

ABSTRAK

Pemilu serentak pertama kali dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang merupakan babak baru bagi kontestasi politik di Indonesia karena pada tahun ini pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 36 kota yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama 2016. Pilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal.

Menurut Huntington Pemilihan Umum adalah pintu masuk (*entry point*) demokratisasi yang merupakan pandangan paling banyak memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan berbasis pilihan public, pelembagaan perebutan kekuasaan secara damai dan pada akhirnya memungkinkan rakyat melakukan control terhadap kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni melalui wawancara mendalam. Kemudian data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan keperluan disimpulkan untuk disajikan.

Penelitian ini menggunakan teori Partai Politik sebagai Rekrutmen Politik dan Strategi Politik.

Hasil Penelitian ini menghasilkan bahwa selama penelitian berlangsung, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Calon Tunggal pada Pilkada Serentak 2015, beberapa faktor tersebut terdapat beberapa kesimpulan, yakni terjadinya Calon Tunggal merupakan salah satu strategi dari lawan politik dari petahana UU Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto, mengacu pada Undang-Undang waktu itu yang mengatakan syarat untuk dilaksanakannya Pilkada yakni minimal harus ada 2 calon pasangan. Dikarenakan petahana dianggap bisa memobilisasi baik dibidang anggaran maupun dibidang birokrat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian atas usul MUI yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang menginginkan agar Pak Ruhimat mundur dari bursa pencalonan Pilkada Serentak 2015.

Kata Kunci: Pemilu, Pilkada, Pilkada Serentak

ABSTRACT

Simultaneous elections were held for the first time on December 9, 2015 which was a new chapter for political contestation in Indonesia because this year the first time the regional head elections were held simultaneously in 9 provinces, 224 districts and 36 cities, namely provinces and districts / cities with tenure. regions ended in 2015 and the first semester of 2016. Simultaneous local elections in 2015 made a polemic because in some areas there were only one pair of regional head candidates, or a single candidate.

According to Huntington the General Election is the entry point (democratization) entry point which is the most likely view of the rotation of power based on public choice, the institutionalization of a peaceful struggle for power and ultimately allows the people to exercise control over public policy.

This research uses qualitative research methods. The technique used in data collection is through in-depth interviews. Then the data obtained will be reduced based on the needs concluded to be presented.

The research uses Political party theory as political recruitment and political strategy.

The results of this study indicate that during the research, there were several factors that led to the occurrence of a Single Candidate in the 2015 Simultaneous Local Election, some of these factors came to several conclusions, namely the occurrence of a Single Candidate is one of the strategies of political opponents from incumbent Law Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto, referring at the time the Law said that the conditions for the implementation of the elections were that there must be at least 2 potential partners. Because incumbent is considered to be able to mobilize both in the budget and in the field of bureaucrats in Tasikmalaya Regency. Then at the suggestion of the MUI in Tasikmalaya Regency who wanted Ruhimat to resign from the 2015 Simultaneous Election candidacy.

Keywords: *Election, Local Election, Simultaneous Local Election*